

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2019**

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019



Jl. Timor Raya Km 32 Kupang-NTT

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Kupang, 12 Maret 2020

Kepala Balai,

Dr. Procula Rudlof Matitaputty, S.Pt., M.S
NIP. 196704141998031001

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DASAR HUKUM	iv
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	v
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	1
III. Laporan Operasional	1
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	1
V. Catatan atas Laporan Keuangan	2
A. PENJELASAN UMUM	7
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	14
B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	14
B.2. BELANJA	15
B.3. BELANJA PEGAWAI	16
B.4. BELANJA BARANG	16
B.5. BELANJA MODAL.....	17
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	19
C.1. ASET LANCAR	19
C.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas.....	19
C.1.2. Piutang Bukan Pajak	19
C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak.....	19
C.1.4. Persediaan	20
C.2. ASET TETAP	20
C.2.1. Tanah	20
C.2.2. Peralatan dan Mesin.....	20
C.2.3. Gedung dan Bangunan	22
C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	22
C.2.5. Aset Tetap Lainnya	23
C.4. ASET LAINNYA.....	24
C.4.1. Aset Tak Berwujud	24
C.4.2. Aset Lain-lain	24
C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	25
C.6. EKUITAS.....	25
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	26
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	26
D.2. Beban Pegawai	26
D.3. Beban Persediaan	27
D.4. Beban Barang dan Jasa	27
D.5. Beban Pemeliharaan	28
D.6. Beban Perjalanan Dinas.....	28
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	29

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.....	30
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	31
E.1. Ekuitas Awal.....	31
E.2. Surplus/Defisit-LO.....	31
E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar.....	31
E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi.....	31
E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap.....	31
E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi.....	31
E.3.4. Koreksi Lain-lain.....	32
E.4. Transaksi Antar Entitas.....	32
E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL).....	33
E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar.....	33
E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung.....	33
E.5. Ekuitas Akhir.....	33
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.....	34
F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca.....	34
F.2. Pengungkapan Lain-lain.....	34

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara ;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tatacara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tatacara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kupang, 12 Maret 2020

Kepala Balai,



Dr. Procula Rudlof Matitaputty, S.Pt., M.S
NIP. 196704141998031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp327,740,688.00 atau mencapai 113.18% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp289,585,000.00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp21,395,598,003.00 atau mencapai 96.43% dari alokasi anggaran sebesar Rp22,187,549,000.00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp377,823,313,613.00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp131,485,703.00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp377,459,985,290.00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0.00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp231,842,620.00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp3,674,102.00 dan Rp377,819,639,511.00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp303,445,988.00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp22,748,422,658.00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-22,444,976,670.00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp250,038,300.00 dan Defisit Rp0.00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-22,194,938,370.00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp995,057,886,763.00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-22,194,938,370.00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp-616,187,932,531.00 dan

ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp21,144,623,649.00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp377,819,639,511.00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) NTT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019			31 Desember 2018
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	289,585,000.00	327,740,688.00	113.18	387,051,259.00
Jumlah Pendapatan		289,585,000.00	327,740,688.00	113.18	387,051,259.00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	10,127,270,000.00	10,078,937,090.00	99.52	10,093,843,137.00
Belanja Barang	B.4.	9,385,279,000.00	8,839,310,913.00	94.18	9,345,720,142.00
Belanja Modal	B.5.	2,675,000,000.00	2,477,350,000.00	92.61	4,966,077,932.00
Jumlah Belanja		22,187,549,000.00	21,395,598,003.00	96.43	24,405,641,211.00

II. NERACA

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) NTT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.1.	91,703.00	450,169.00
Piutang Bukan Pajak	C.1.2.	0.00	1,076,400.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.3.	0.00	-5,382.00
Persediaan	C.1.4.	131,394,000.00	120,821,000.00
Jumlah Aset Lancar		131,485,703.00	122,342,187.00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	334,539,404,000.00	334,539,404,000.00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	13,657,264,923.00	11,105,915,123.00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	41,837,903,171.00	672,353,005,872.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	4,979,250,056.00	5,774,665,016.00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	140,049,025.00	140,049,025.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-17,693,885,885.00	-28,984,003,060.00
Jumlah Aset Tetap		377,459,985,290.00	994,929,035,976.00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.4.1.	17,573,573.00	17,573,573.00
Aset Lain-lain	C.4.2.	932,297,438.00	136,882,478.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3.	-718,028,391.00	-147,661,051.00
Jumlah Aset Lainnya		231,842,620.00	6,795,000.00
Jumlah Aset		377,823,313,613.00	995,058,173,163.00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1.	3,674,102.00	286,400.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3,674,102.00	286,400.00
Jumlah Kewajiban		3,674,102.00	286,400.00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	377,819,639,511.00	995,057,886,763.00
Jumlah Ekuitas		377,819,639,511.00	995,057,886,763.00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		377,823,313,613.00	995,058,173,163.00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) NTT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	303,445,988.00	352,948,443.00
JUMLAH PENDAPATAN		303,445,988.00	352,948,443.00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	10,082,611,192.00	10,094,129,537.00
Beban Persediaan	D.3.	1,639,111,954.00	2,039,094,500.00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	3,712,927,065.00	3,221,215,956.00
Beban Pemeliharaan	D.5.	1,208,445,553.00	1,180,261,230.00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	2,619,543,895.00	3,073,912,456.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	3,485,788,381.00	20,276,156,838.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8.	-5,382.00	5,382.00
JUMLAH BEBAN		22,748,422,658.00	39,884,775,899.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-22,444,976,670.00	-39,531,827,456.00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	0.00	2,690,000.00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	250,038,300.00	502,651,216.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	0.00	293,962,000.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		250,038,300.00	211,379,216.00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-22,194,938,370.00	-39,320,448,240.00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) NTT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
EKUITAS AWAL	E.1.	995,057,886,763.00	109,566,173,271.00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-22,194,938,370.00	-39,320,448,240.00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	-616,187,932,531.00	900,851,555,311.00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1.	121,345,554.00	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.2.	-625,815,230,245.00	900,851,555,311.00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.3.	9,505,665,760.00	0.00
Koreksi Lain-lain	E.3.4.	286,400.00	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	21,144,623,649.00	23,960,606,421.00
EKUITAS AKHIR	E.5.	377,819,639,511.00	995,057,886,763.00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT

BPTP NTT didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan.

Tugas Pokok

Melaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Fungsi

- Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- Pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan;
- Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi

dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	273,115,000.00	273,115,000.00
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	16,470,000.00	16,470,000.00
Jumlah Pendapatan	289,585,000.00	289,585,000.00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	10,000,809,000.00	10,126,770,000.00
Belanja Lembur	126,461,000.00	500,000.00
Belanja Barang Operasional	590,850,000.00	590,850,000.00
Belanja Barang Non Operasional	2,197,426,000.00	3,097,632,000.00
Belanja Barang Persediaan	1,791,058,000.00	1,465,767,000.00
Belanja Jasa	334,800,000.00	334,800,000.00
Belanja Pemeliharaan	1,224,050,000.00	1,224,050,000.00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2,091,700,000.00	2,672,180,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,675,000,000.00	2,675,000,000.00
Jumlah Belanja	21,032,154,000.00	22,187,549,000.00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp327,740,688.00 atau mencapai 113.18% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp289,585,000.00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	16,470,000.00	13,158,000.00	79.89
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	273,115,000.00	13,186,283.00	4.83
Pendapatan Denda	0.00	21,167,243.00	0.00
Pendapatan Lain-lain	0.00	23,219,762.00	0.00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0.00	257,009,400.00	0.00
Jumlah	289,585,000.00	327,740,688.00	113.18

Realisasi Pendapatan TA 2019 mengalami penurunan sebesar -15.32% dibandingkan TA 2018. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	13,158,000.00	49,530,000.00	-73.43
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0.00	14,495,516.00	-100.00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	13,186,283.00	16,970,426.00	-22.30
Pendapatan Denda	21,167,243.00	149,555,811.00	-85.85
Pendapatan Lain-lain	23,219,762.00	17,996,506.00	29.02
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	257,009,400.00	138,503,000.00	85.56
Jumlah	327,740,688.00	387,051,259.00	-15.32

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2019 adalah sebesar Rp21,395,598,003.00 atau 96.43% dari anggaran belanja sebesar Rp22,187,549,000.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2019

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	10,127,270,000.00	10,079,502,093.00	99.53
Belanja Barang	9,385,279,000.00	8,849,100,413.00	94.29
Belanja Modal	2,675,000,000.00	2,477,350,000.00	92.61
Total Belanja Kotor	22,187,549,000.00	21,405,952,506.00	96.48
Pengembalian Belanja		-10,354,503.00	0.00
Total Belanja	22,187,549,000.00	21,395,598,003.00	96.43

Dibandingkan dengan Tahun 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami penurunan sebesar -12.33% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Belanja Pegawai	10,078,937,090.00	10,093,843,137.00	-0.15
Belanja Barang	8,839,310,913.00	9,345,720,142.00	-5.42
Belanja Modal	2,477,350,000.00	4,966,077,932.00	-50.11
Total Belanja	21,395,598,003.00	24,405,641,211.00	-12.33

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp10,078,937,090.00 dan Rp10,093,843,137.00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2019 mengalami penurunan sebesar -0.15% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh: Hal ini disebabkan antara lain oleh: Penyesuaian belanja pegawai karena terdapat pegawai yang purna bakti

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	10,079,502,093.00	10,094,783,933.00	-0.15
Jumlah Belanja Kotor	10,079,502,093.00	10,094,783,933.00	-0.15
Pengembalian Belanja Pegawai	-565,003.00	-940,796.00	-39.94
Jumlah Belanja	10,078,937,090.00	10,093,843,137.00	-0.15

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp8,839,310,913.00 dan Rp9,345,720,142.00. Realisasi belanja barang TA 2019 mengalami penurunan sebesar -5.42% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	580,552,930.00	625,227,940.00	-7.15
Belanja Barang Non Operasional	2,862,802,425.00	2,300,773,360.00	24.43
Belanja Barang Persediaan	1,344,854,900.00	1,927,574,000.00	-30.23
Belanja Jasa	266,446,710.00	295,214,656.00	-9.74
Belanja Pemeliharaan	1,165,110,053.00	1,123,017,730.00	3.75
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2,629,333,395.00	3,073,912,456.00	-14.46
Jumlah Belanja Kotor	8,849,100,413.00	9,345,720,142.00	-5.31
Pengembalian Belanja Barang	-9,789,500.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	8,839,310,913.00	9,345,720,142.00	-5.42

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2,477,350,000.00 dan Rp4,966,077,932.00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2019 mengalami penurunan sebesar -50.11% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,477,350,000.00	1,042,357,387.00	137.67
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	3,475,743,545.00	-100.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	447,977,000.00	-100.00
Jumlah Belanja Kotor	2,477,350,000.00	4,966,077,932.00	-50.11
Pengembalian Belanja Modal	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	2,477,350,000.00	4,966,077,932.00	-50.11

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2,477,350,000.00 dan

Rp1,042,357,387.00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 137.67% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Kebutuhan sesuai anggaran untuk melengkapi peralatan laboratorium
2. Kebutuhan untuk menggantikan peralatan dan mesin yang sudah rusak

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,477,350,000.00	1,042,357,387.00	137.67
Jumlah Belanja Kotor	2,477,350,000.00	1,042,357,387.00	137.67
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	2,477,350,000.00	1,042,357,387.00	137.67

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp91,703.00 dan Rp450,169.00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas
per 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2019
Kas Lainnya dan Setara Kas	91,703.00
Jumlah	91,703.00

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp1,076,400.00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Piutang Lainnya	0.00	1,076,400.00
Jumlah	0.00	1,076,400.00

C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp-5,382.00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	0,00	0,5%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00

C.1.4. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp131,394,000.00 dan Rp120,821,000.00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Bahan Baku	131,394,000.00	104,411,000.00
Persediaan Lainnya	0.00	16,410,000.00
Jumlah	131,394,000.00	120,821,000.00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp334,539,404,000.00 dan Rp334,539,404,000.00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp13,657,264,923.00 dan Rp11,105,915,123.00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	11,105,915,123.00
Mutasi Tambah	
Pembelian	2,474,225,000.00
Transfer Masuk	77,124,800.00
Saldo per 31 Desember 2019	13,657,264,923.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-9,319,839,796.00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	4,337,425,127.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

Pembelian

132111	PERALATAN DAN MESIN		48	2,474,225,000.00
3.01.03.05.012	Water Purification	Unit	1	184,000,000.00
3.03.03.10.038	Analytical Balance (Neraca Analitik)	buah	1	24,500,000.00
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	Buah	4	6,800,000.00
3.05.01.04.025	Lemari Katalog	Buah	2	36,000,000.00
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	17	18,650,000.00
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah	2	13,500,000.00
3.05.02.01.004	Kursi Kayu	Buah	1	3,525,000.00
3.05.02.01.014	Meja Resepsionis	Buah	1	12,500,000.00
3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	2	2,400,000.00
3.05.02.01.029	Backdrop TV/Wardrobe	set	1	8,000,000.00
3.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	2	7,700,000.00
3.05.02.06.036	Dispenser	Buah	1	12,950,000.00
3.06.01.02.128	Camera Digital	Buah	1	9,800,000.00
3.06.02.01.999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya		1	12,450,000.00
3.08.01.04.006	Ground Water Anologous	Buah	1	3,300,000.00
3.08.01.12.018	Pipette Filter	Buah	2	17,900,000.00
3.08.01.12.046	Atomic Absorption Spectro	Buah	1	1,031,000,000.00
3.08.01.13.064	Aqua Meter/Titrator	Buah	1	107,000,000.00
3.08.01.14.025	Shaker (Alat Laboratorium Patologi)	Buah	1	85,000,000.00
3.08.01.17.016	Lemari Asam	Buah	1	189,500,000.00
3.08.01.41.299	Uv-Vis Spectrophotometer	Buah	1	288,500,000.00
3.08.01.41.335	Digestor Heating	Buah	1	387,500,000.00
3.10.01.02.002	Lap Top	Buah	1	9,950,000.00
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	1,800,000.00

Transfer Masuk dari Ditjen Tanaman Pangan

132111	PERALATAN DAN MESIN		3	77,124,800
3.05.02.06.002	Televisi	Buah	1	57,124,000
3.06.01.02.165	Camera Conference	Buah	1	2,000,800
3.10.01.02.001	P.C Unit	Buah	1	18,000,000
TOTAL				77,124,800

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp41,837,903,171.00 dan Rp672,353,005,872.00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	672,353,005,872.00
Mutasi Tambah	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	9,309,111,616.00
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	74,380,299.00
Mutasi Kurang	
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	-625,821,027,000.00
Koreksi Pencatatan	-14,077,567,616.00
Saldo per 31 Desember 2019	41,837,903,171.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-6,026,820,074.00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	35,811,083,097.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

Mutasi Penambahan :

1. melalui koreksi pencatatan nilai/kuantitas berupa bangunan gedung Kantor permanen senilai Rp. 9,309,111,616.00;
2. melalui Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali berupa Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan senilai Rp. 74,380,299;

Mutasi Kurang :

1. Melalui Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan berupa Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan senilai Rp. -625,821,027,000.00;
2. Melalui Koreksi Pencatatan berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen senilai Rp -14,077,567,616.00

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4,979,250,056.00 dan Rp5,774,665,016.00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	5,774,665,016.00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-795,414,960.00
Saldo per 31 Desember 2019	4,979,250,056.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-299,965,532.00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	4,679,284,524.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah berupa:

1. mutasi kurang melalui Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya yaitu penghentian asset tdari penggunaannya
 - Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air) 2 unit senilai Rp. -795,414,960

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp140,049,025.00 dan Rp140,049,025.00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-17,693,885,885.00 dan Rp-28,984,003,060.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	13,657,264,923.00	-9,319,839,796.00	4,337,425,127.00
2.	Gedung dan Bangunan	41,837,903,171.00	-6,026,820,074.00	35,811,083,097.00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4,979,250,056.00	-299,965,532.00	4,679,284,524.00
4.	Aset Tetap Lainnya	140,049,025.00	0.00	140,049,025.00
Akumulasi Penyusutan		60,614,467,175.00	-17,693,885,885.00	42,920,581,290.00

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp17,573,573.00 dan Rp17,573,573.00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Paten	800,000.00
Software	16,773,573.00
Jumlah	17,573,573.00

C.4.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp932,297,438.00 dan Rp136,882,478.00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	136,882,478.00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	795,414,960.00
Saldo per 31 Desember 2019	932,297,438.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-707,169,818.00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	225,127,620.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa:

Mutasi Penambahan :

1. Melalui Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya berupa Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air) 2 unit senilai Rp. 795,414,960

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-718,028,391.00 dan Rp-147,661,051.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	17,573,573.00	-10,658,573.00	6,915,000.00
2.	Aset Lain-lain	932,297,438.00	-707,169,818.00	225,127,620.00
Akumulasi Penyusutan		949,871,011.00	-718,028,391.00	231,842,620.00

C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3,674,102.00 dan Rp286,400.00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	3,674,102.00	286,400.00
Jumlah	3,674,102.00	286,400.00

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp377,819,639,511.00 dan Rp995,057,886,763.00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp303,445,988.00 dan Rp352,948,443.00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan Anggaran Lain-lain	1,462.00	2,806.00	-47.90
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	20,090,843.00	150,632,211.00	-86.66
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	257,009,400.00	138,503,000.00	85.56
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	13,158,000.00	49,530,000.00	-73.43
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	13,186,283.00	14,280,426.00	-7.66
Jumlah	303,445,988.00	352,948,443.00	-14.03

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp10,082,611,192.00 dan Rp10,094,129,537.00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	6,931,501,882.00	6,882,692,080.00	0.71
Beban Pembulatan Gaji PNS	94,038.00	384,664.00	-75.55
Beban Tunj. Anak PNS	179,981,756.00	180,616,388.00	-0.35
Beban Tunj. Beras PNS	365,793,420.00	388,533,300.00	-5.85
Beban Tunj. Fungsional PNS	678,610,000.00	710,000,000.00	-4.42
Beban Tunj. PPh PNS	38,769,256.00	33,869,371.00	14.47
Beban Tunj. Struktural PNS	31,140,000.00	32,760,000.00	-4.95

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	533,039,840.00	530,768,530.00	0.43
Beban Tunjangan Umum PNS	251,505,000.00	261,554,204.00	-3.84
Beban Uang Makan PNS	1,072,176,000.00	1,072,951,000.00	-0.07
Jumlah	10,082,611,192.00	10,094,129,537.00	-0.11

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1,639,111,954.00 dan Rp2,039,094,500.00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	628,102,000.00	944,186,500.00	-33.48
Beban Persediaan konsumsi	631,427,900.00	524,337,500.00	20.42
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	396,000.00	0.00	0.00
Beban persediaan lainnya	379,186,054.00	570,570,500.00	-33.54
Jumlah	1,639,111,954.00	2,039,094,500.00	-19.62

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3,712,927,065.00 dan Rp3,221,215,956.00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	3,125,000.00	0.00	0.00
Beban Bahan	524,231,050.00	599,435,250.00	-12.55
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,826,231,375.00	922,035,810.00	98.07
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	118,800,000.00	90,150,000.00	31.78
Beban Honor Output Kegiatan	512,340,000.00	779,302,300.00	-34.26
Beban Jasa Konsultansi	0.00	20,000,000.00	-100.00
Beban Jasa Profesi	10,000,000.00	11,000,000.00	-9.09
Beban Keperluan Perkantoran	461,752,930.00	535,077,940.00	-13.70
Beban Langganan Air	4,177,100.00	3,345,600.00	24.85
Beban Langganan Listrik	216,023,328.00	222,175,714.00	-2.77
Beban Langganan Telepon	36,246,282.00	38,693,342.00	-6.32
Jumlah	3,712,927,065.00	3,221,215,956.00	15.26

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1,208,445,553.00 dan Rp1,180,261,230.00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	455,645,900.00	348,799,900.00	30.63
Beban Pemeliharaan Lainnya	203,997,014.00	352,800,250.00	-42.18
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	488,482,139.00	409,775,480.00	19.21
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16,985,000.00	11,642,100.00	45.89
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	40,810,500.00	35,370,500.00	15.38
Beban Persediaan suku cadang	2,525,000.00	21,873,000.00	-88.46
Jumlah	1,208,445,553.00	1,180,261,230.00	2.39

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2,619,543,895.00 dan Rp3,073,912,456.00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi

untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	2,087,522,642.00	2,288,853,261.00	-8.80
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	160,040,000.00	226,810,000.00	-29.44
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	371,981,253.00	558,249,195.00	-33.37
Jumlah	2,619,543,895.00	3,073,912,456.00	-14.78

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3,485,788,381.00 dan Rp20,276,156,838.00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Amortisasi Paten	80,000.00	40,000.00	100.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,829,232,312.00	17,836,336,851.00	-89.74
Beban Penyusutan Irigasi	85,516,236.00	114,519,112.00	-25.33
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	370,509,026.00	1,380,294,244.00	-73.16
Beban Penyusutan Jaringan	50,291,135.00	42,824,853.00	17.43
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	28,140,952.00	0.00	0.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,122,018,720.00	902,141,778.00	24.37
Jumlah	3,485,788,381.00	20,276,156,838.00	-82.81

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0.00	-293,962,000.00	-100.00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0.00	14,495,516.00	-100.00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0.00	286,442,000.00	-100.00
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	226,820,000.00	183,720,000.00	23.46
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0.00	2,690,000.00	-100.00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0.00	2,250,000.00	-100.00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	23,218,300.00	15,743,700.00	47.48
Jumlah	250,038,300.00	211,379,216.00	18.29

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp995,057,886,763.00 dan Rp109,566,173,271.00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp-22,194,938,370.00 dan Rp-39,320,448,240.00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-616,187,932,531.00 dan Rp900,851,555,311.00.

E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp121,345,554.00 dan Rp0.00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi reklasifikasi nilai persediaan, aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-625,815,230,245.00 dan Rp900,851,555,311.00. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2019.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Gedung dan Bangunan	-625,746,646,701.00
Jumlah	-625,815,230,245.00

E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp9,505,665,760.00 dan Rp0.00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset

Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	14,274,121,760.00
Gedung dan Bangunan	-4,768,456,000.00
Jumlah	9,505,665,760.00

E.3.4. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp286,400.00 dan Rp0.00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-lain per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	286,400.00
Jumlah	286,400.00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp21,144,623,649.00 dan Rp23,960,606,421.00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Ditagihkan ke Entitas Lain	20,755,978,003.00
Diterima dari Entitas Lain	-327,740,688.00
Transfer Masuk	77,124,800.00
Pengesahan Hibah Langsung	639,261,534.00
Jumlah	21,144,623,649.00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2019 saldo DDEL adalah sebesar Rp-327,740,688.00 sedangkan DKEL sebesar Rp20,755,978,003.00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp77,124,800.00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2019.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	018030199238251000KP	77,124,800.00
Jumlah			77,124,800.00

E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp639,261,534.00 dan Rp417,450,169.00.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 639,261,534.00 dan Rp 417,000,000.00.

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1.	Aciar	Uang	639,261,534,00
Jumlah Nilai Hibah			639,261,534.00

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp377,819,639,511.00 dan Rp995,057,886,763.00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

F.2. Pengungkapan Lain-lain

1. Adanya pergantian Kuasa Pengguna Anggaran dari Dr. Ir. Syamsudin, M.Sc Kepada Dr.Procula Rudlof Matitaputty, S.Pt, M.Si sesuai Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 662/Kpts/KP.230/A/9/2019 Tanggal 19 September 2019;
2. Adanya Pengangkatan Pelaksana Harian terhitung 29 Nopember 2019 An. Christofel J. B Sendow, SST, M.Sc sebagai Sesuai Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Balai Nomor : 10203/KP.440/H.12.18/11/2019 Tanggal 29 Nopember 2019.